

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

WALHI merupakan salah satu NGO yang bergerak dibidang pelestarian dan penyelamatan lingkungan, salah satu agenda penyelamatan lingkungan yang dilakukan WALHI khususnya Sumatera Barat adalah advokasi kebijakan reklamasi di Danau Singkarak. Berdasarkan hasil temuan data yang peneliti dapatkan, ditemukan adanya indikasi pelanggaran pada reklamasi Danau Singkarak, yang mana reklamasi tersebut diduga ilegal karena tidak mengantongi perizinan yang jelas. Dalam proses tersebut WALHI Sumatera Barat berhasil melakukan advokasi kebijakan pada reklamasi di Danau Singkarak dengan berhasil melakukan penghentian proyek reklamasi, dengan dikeluarkan Surat Edaran Komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Danau Singkarak, yang berisi kesepakatan untuk melakukan pemulihan kawasan Danau Singkarak dengan mengembalikan tata ruang dan fungsi Danau kepada fungsi awalnya oleh CV Anamdaro dan PT Kalukua Indah Permai, serta pemberian sanksi terhadap kegiatan proyek reklamasi yang dilakukan di kawasan Danau Singkarak.

Pada proses advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat pada reklamasi Danau Singkarak, peneliti menjabarkan proses advokasi tersebut kedalam 10 indikator yang dikemukakan oleh Roem Topatimasang yakni: *Pertama*, Membentuk Lingkar Inti dapat dikatakan kumpulan orang dan/atau organisasi yang

menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi yang dalam hal ini WALHI Sumatera Barat berperan sebagai Lingkar Inti dalam kegiatan advokasi. *Kedua*, Memilih Isu Strategis pada tahapan ini WALHI Sumatera Barat memilih reklamasi Danau Singkarak yang diduga ilegal dan tanpa mengantongi perizinan yang jelas. *Ketiga*, Merancang Sasaran & Strategi, pada tahapan ini WALHI Sumatera Barat memulai dengan mengumpulkan data dan informasi, berkoordinasi dengan instansi terkait dan menggalang sekutu dan pendukung dalam kegiatan advokasi. *Keempat*, Menggalang Sekutu dan Pendukung, pada proses ini WALHI Sumatera Barat dalam kegiatan advokasi melibatkan banyak pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, ditjen sumber daya air, kemudian Kementerian ATR/BPN dan KPK, dalam proses advokasi karena KPK punya program penyelamatan aset negara. *Kelima*, Mengajukan Rancangan Tanding, pihak WALHI Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait dengan mengajukan beberapa rekomendasi yaitu, melakukan penghentian kegiatan reklamasi, dan melakukan perbaikan atas kerusakan lingkungan yang dibebankan kepada PT KIP dan CV Anamdar. *Keenam*, Mempengaruhi Pembuat Kebijakan, pada tahap ini WALHI Sumatera Barat melakukan beberapa kegiatan seperti lobi, negosiasi, mediasi, kolaborasi dan sebagainya yang menghasilkan keputusan penghentian proyek dan pemulihan kawasan Danau yang di reklamasi. *Ketujuh*, Membangun Basis Gerakan, WALHI Sumatera Barat memiliki dasar legitimasi yang memang ditujukan untuk perjuangan untuk kedaulatan rakyat atas sumber – sumber kehidupan. *Kedelapan*, Memantau dan Menilai Program, pada tahap ini WALHI Sumatera Barat masih

tetap melakukan pemantuan dan monitor terhadap program yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan indikator diatas, peneliti melihat adanya peran advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat untuk menghentikan kegiatan reklamasi di Danau Singkarak, sehingga kebijakan reklamasi di Danau Singkarak dibatalkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Danau Singkarak.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian ini, saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas peran WALHI Sumatera Barat dalam mengadvokasi kebijakan, untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan reklamasi di Danau Singkarak
2. Kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan tentang pelestarian dan penyelamatan lingkungan danau serta memperjelas aturan kebijakan mengenai reklamasi di kawasan Danau, khususnya Danau yang termasuk kedalam Danau prioritas nasional
3. Kepada WALHI Sumatera Barat untuk tetap terus menjadi NGO yang selalu didasarkan perjuangan kedaulatan rakyat atas sumber sumber kehidupan.